



KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450
Telepon: (021) 3905876/77 Faksimile: (021) 31903755
Website: www.komisiyudisial.go.id, Email: kyri@komisiyudisial.go.id

Nomor: 26/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/07/2024

UNTUK DITERBITKAN SEGERA

Jakarta, 30 Juli 2026

KY Terima 1.402 Laporan Masyarakat dan Laporan dengan Konfirmasi Eksternal pada Semester I Tahun 2026

Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) mencatat menerima sebanyak 1.402 yang terdiri dari 740 laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dan 662 laporan dengan konfirmasi eksternal selama periode Januari s.d. Juni 2026. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan dengan penerimaan laporan pada periode Januari s.d. Juni 2025 yang tercatat sebanyak 1.271 yang terdiri 619 laporan dugaan pelanggaran KEPPH dan 652 laporan dengan konfirmasi eksternal.

"Laporan masyarakat itu mencerminkan besarnya harapan masyarakat terhadap tegaknya integritas hakim, sehingga amanah tersebut dijalankan dengan pengawasan hakim yang profesional, transparan, dan berkeadilan," jelas Anggota KY selaku Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Abhan dalam konferensi pers Penyampaian Penanganan Laporan Masyarakat Semester I Tahun 2026, Kamis (30/7/2026) di Auditorium KY, Jakarta.

Laporan masyarakat yang masuk itu diverifikasi untuk diperiksa kelengkapan persyaratan administrasi dan substansi. Ada 676 laporan atau 87,37% yang dinyatakan diterima oleh KY, sementara sisanya masih dalam proses verifikasi.

"Laporan yang memenuhi persyaratan administrasi dan substansi untuk dilakukan registrasi sebanyak 88 laporan. Jumlah ini juga meningkat, karena dibandingkan periode Januari s.d Juni 2025 sebanyak 79 laporan," jelas Abhan.

Abhan mengungkapkan, KY tidak dapat menindaklanjuti semua laporan yang masuk, karena banyak laporan yang masuk bukan menjadi kewenangan KY. "Ada juga laporan terkait

keberatan mengenai pertimbangan dan putusan yang menjadi kemandirian hakim," tegas Abhan.

Berdasarkan jenis perkara, 740 laporan masyarakat tersebut terdiri dari 439 perkara perdata, 158 perkara pidana, 29 perkara Tata Usaha Negara (TUN), 25 perkara agama, 20 perkara Hubungan Industrial, 17 perkara niaga, 8 perkara tipikor, 5 perkara militer, 2 perkara pajak, dan 37 perkara lainnya.

"Berdasarkan lokasi aduan, maka masih didominasi kota-kota besar di Indonesia. Adapun 10 provinsi terbanyak yang melapor dugaan KEPPH ke KY adalah DKI Jakarta (145 laporan), Jawa Barat (91 laporan), Sumatera Utara (73 laporan), Jawa Timur (62 laporan), Riau (39 laporan), Jawa Tengah (37 laporan), Sulawesi Selatan (34 laporan), Banten (30 laporan), Kalimantan Timur (22 laporan), dan Sumatera Selatan (20 laporan)," ungkap Abhan soal 10 provinsi terbanyak yang melaporkan dugaan pelanggaran kode etik hakim ke KY.

Adapun dilihat dari jenis badan peradilan yang dilaporkan, lanjut Abhan, masih didominasi oleh peradilan umum (529 laporan), kemudian peradilan agama (64 laporan), Mahkamah Agung (63 laporan), TUN (27 laporan), hubungan industrial (15 laporan), Niaga (14 laporan), militer (6 laporan), tipikor (4 laporan), Mahkamah Syar'iyah (1 laporan) dan lainnya (17 laporan).

KY Panggil 84 Hakim Terlapor untuk Klarifikasi Dugaan Pelanggaran KEPPH

Berdasarkan Peraturan KY Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penanganan Dugaan Pelanggaran KEPPH, laporan yang telah diverifikasi kemudian dilakukan penelaahan atau analisis awal dugaan pelanggaran KEPPH yang selanjutnya dibawa ke forum konsultasi.

"Berdasarkan forum konsultasi yang telah dilaksanakan, ada 121 laporan yang memperoleh pendapat atau persetujuan dari seorang Anggota KY sebagai penanggung jawab untuk ditindaklanjuti. Jika laporan dapat ditindaklanjuti, maka laporan diregister dan dilakukan pemeriksaan dan/atau klarifikasi," urai Abhan.

Proses penanganan dilakukan melalui pemeriksaan secara tatap muka atau _online_ terhadap berbagai pihak termasuk pelapor dan saksi yang hasilnya berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta pengumpulan bukti-bukti yang detail sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap hakim terlapor.

Abhan mengungkapkan, KY telah memanggil 418 orang yang berasal dari 119 laporan yang masuk untuk dimintai keterangan atau klarifikasi. Pemanggilan dilakukan terhadap pelapor/kuasa pelapor sebanyak 91 orang, dengan jumlah yang hadir sebanyak 69 orang dan tidak hadir sebanyak 22 orang.

Sementara pemanggilan terhadap saksi/ahli sebanyak 243 orang, dengan jumlah yang hadir sebanyak 222 orang dan tidak hadir sebanyak 21 orang.

"Pemanggilan terhadap hakim terlapor sebanyak 84 orang, dengan jumlah yang hadir sebanyak 65 orang dan tidak hadir sebanyak 19 orang. Tujuan pemanggilan ini untuk dimintai klarifikasi terkait dugaan pelanggaran KEPPH," ungkap Abhan.

Kemudian KY melanjutkan dengan sidang pleno untuk menentukan terbukti atau tidak terbukti melanggar KEPPH terhadap 73 laporan.

"KY melaksanakan sidang pleno terhadap 207 laporan, kemudian diputuskan bahwa 73 laporan terbukti dengan 121 hakim diberikan usul penjatuhan sanksi," pungkas Abhan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:

Pusat Analisis dan Layanan Informasi KY

Jl. Kramat Raya No.57, Jakarta Pusat,

(021) 3906189

www.komisiyudisial.go.id

email: humas@komisiyudisial.go.id



#KinerjaKY

PENANGANAN LAPORAN MASYARAKAT

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA



PERIODE JANUARI - JUNI 2026

PENERIMAAN LAPORAN MASYARAKAT BERDASARKAN MEDIA PENYAMPAIAN

TOTAL PENERIMAAN LAPORAN

2026

1.402

LAPORAN

2025

1.271

LAPORAN

10,3 %

Naik 131 Laporan

Dibanding Periode Januari-Juni 2025

TAHUN 2026

Jumlah Laporan Masyarakat yang Diterima

740
LAPORAN

TAHUN 2025

Jumlah Laporan Masyarakat yang Diterima

619
LAPORAN

KENAIKAN

121
LAPORAN
atau meningkat
19,5%
dibanding periode
Januari-Juni 2025

PENERIMAAN LAPORAN DENGAN KONFIRMASI EKSTERNAL

2026
662
LAPORAN2025
652
LAPORANKENAIKAN 10 LAPORAN (1,5%)
dibanding periode Januari-Juni 2025

KENAIKAN

10
LAPORAN
atau meningkat
1,5%
dibanding periode
Januari-Juni 2025

RINCIAN PENERIMAAN LAPORAN BERDASARKAN MEDIA PENYAMPAIAN

PENGADUAN
LANGSUNG2026
230
LAPORAN2025
118
LAPORAN

BULAN	2026	2025
Jan	39	22
Feb	45	18
Mar	31	22
Apr	40	17
Mei	33	13
Jun	42	26

PENGADUAN
VIA POS2026
401
LAPORAN2025
377
LAPORAN

BULAN	2026	2025
Jan	62	62
Feb	50	54
Mar	42	73
Apr	99	52
Mei	61	54
Jun	87	82

PENGADUAN
VIA WEBSITE2026
97
LAPORAN2025
37
LAPORAN

BULAN	2026	2025
Jan	14	5
Feb	16	5
Mar	14	8
Apr	20	6
Mei	18	5
Jun	15	8

PENERIMAAN
INFORMASI2026
12
LAPORAN2025
12
LAPORAN

BULAN	2026	2025
Jan	6	6
Feb	1	1
Mar	1	1
Apr	3	3
Mei	1	1
Jun	0	0



#KinerjaKY

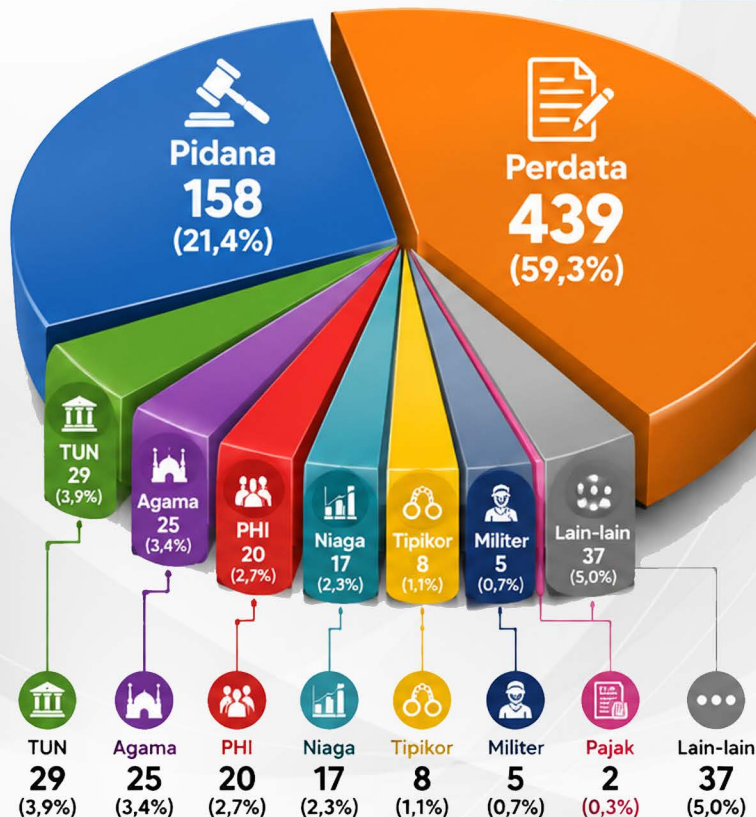
PENANGANAN LAPORAN MASYARAKAT

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA



PERIODE JANUARI - JUNI 2026

PENERIMAAN LAPORAN MASYARAKAT BERDASARKAN JENIS PERKARA



TOTAL LAPORAN

740

LAPORAN



#KinerjaKY

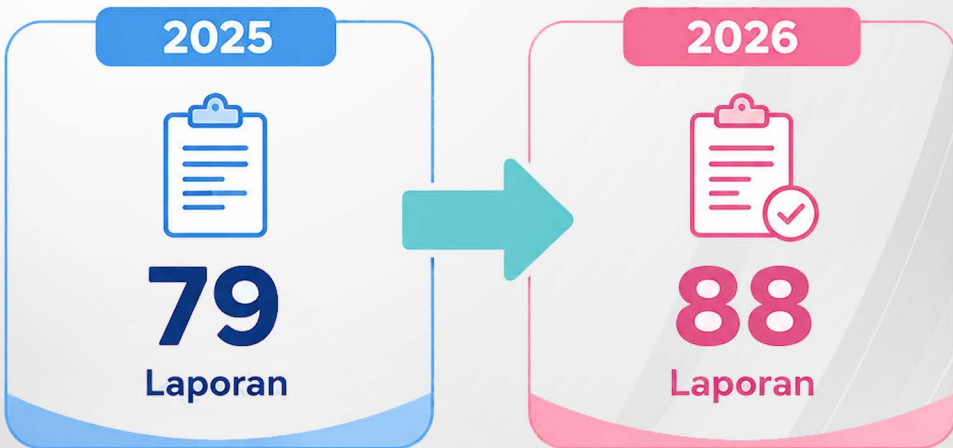
PENANGANAN LAPORAN MASYARAKAT

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA



PERIODE JANUARI - JUNI 2026

REGISTRASI LAPORAN MASYARAKAT



+9

LAPORAN



+11,39%

KENAIKAN



INSIGHT

Registrasi laporan yang memenuhi persyaratan administrasi dan substansi meningkat dari **79 laporan** (Jan–Jun 2025) menjadi **88 laporan** (Jan–Jun 2026), atau naik **9 laporan (11,39%)**.



KomisiYudisial



komisiyudisial



komisiyudisialri



KomisiYudisialRI



www.komisiyudisial.go.id



#KinerjaKY

PENANGANAN LAPORAN MASYARAKAT

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA



PERIODE JANUARI - JUNI 2026

10 PROVINSI TERBANYAK PENERIMAAN LAPORAN MASYARAKAT



PROVINSI LAINNYA

11 BALI	19	25MALUKU	7
12 SUMATERA BARAT	14	26NUSA TENGGARA BARAT	6
13 LAMPUNG	13	27PAPUA	6
14 SULAWESI TENGGARA	13	28KALIMANTAN TENGAH	5
15 JAMBI	10	29PAPUA BARAT	5
16 NUSA TENGGARA TIMUR	10	30Lainnya	4
17 KALIMANTAN SELATAN	10	31 MALUKU UTARA	3
18 KEPULAUAN RIAU	9	32BANGKA BELITUNG	2
19 KALIMANTAN BARAT	9	33KALIMANTAN UTARA	2
20 SULAWESI UTARA	9	34SULAWESI BARAT	1
21 BENGKULU	8	35GORONTALO	0
22DI YOGYAKARTA	8		
23NANGGROE ACEH DARUSSALAM	7		
24SULAWESI TENGAH	7		



#KinerjaKY

PENANGANAN LAPORAN MASYARAKAT

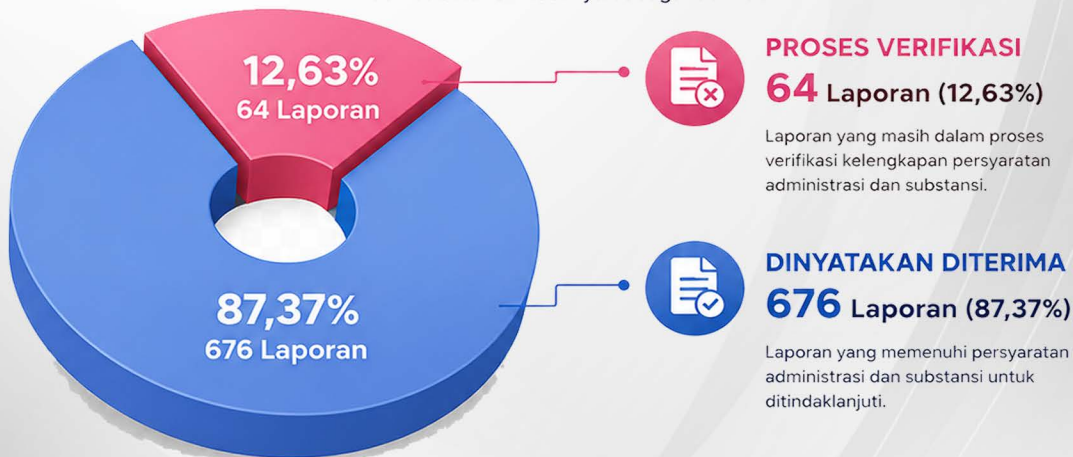
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA



PERIODE JANUARI - JUNI 2026

HASIL VERIFIKASI LAPORAN MASYARAKAT

Laporan yang masuk diverifikasi untuk diperiksa kelengkapan persyaratan administrasi dan substansi. Hasilnya sebagai berikut:



PERBANDINGAN 2025 VS 2026

PERIODE JANUARI – JUNI 2025

**539** Laporan**87,07%** Diterima

PENINGKATAN

**137** Laporan
(▲ 25,42%)**0,30%**
Poin Persentase
(▲ 0,34%)

PERIODE JANUARI – JUNI 2026

**676** Laporan**87,37%**
Diterima

Laporan yang memenuhi persyaratan administrasi dan substansi untuk dilakukan registrasi meningkat dari 79 laporan (Jan–Jun 2025) menjadi 88 laporan (Jan–Jun 2026).

**NAIK**
11,39%
(9 Laporan)



#KinerjaKY

PENANGANAN LAPORAN MASYARAKAT

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA



PERIODE JANUARI - JUNI 2026

PEMERIKSAAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM

KY Panggil 84 Hakim Terlapor untuk Klarifikasi Dugaan Pelanggaran KEPPH

Berdasarkan Peraturan KY Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penanganan Dugaan Pelanggaran KEPPH, laporan yang telah diverifikasi kemudian dilakukan penelaahan atau analisis awal dugaan pelanggaran KEPPH yang selanjutnya dibawa ke forum konsultasi.

PROSES PENANGANAN LAPORAN

**740**

LAPORAN MASUK

**121**

LAPORAN memperoleh pendapat atau persetujuan dari seorang Anggota KY untuk ditindaklanjuti



LAPORAN DIREGISTER

dan dilakukan pemeriksaan dan/atau klarifikasi

**84**

HAKIM TERLAPOR dipanggil untuk diminta klarifikasi terkait dugaan pelanggaran KEPPH



TOTAL PEMANGGILAN

418
ORANG

— berasal dari —

119
LAPORAN

dimintai keterangan atau klarifikasi

RINCIAN PEMANGGILAN

PELAPOR / KUASA PELAPOR

**91**

ORANG

✓ 69 HADIR

✗ 22 TIDAK HADIR

SAKSI / AHLI

**243**

ORANG

✓ 222 HADIR

✗ 21 TIDAK HADIR

HAKIM TERLAPOR

**84**

ORANG

✓ 65 HADIR

✗ 19 TIDAK HADIR

HASIL SIDANG PLENO

**207**
LAPORAN

KY melaksanakan sidang pleno

**73**
LAPORAN

diputuskan terbukti melanggar KEPPH

**121**
HAKIM

diberikan usul penjatihan sanksi

